MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SJK

POJK | Nomor 11/POJK.02/2021 | Tahun 2021

Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan



✓ Berlaku

Berlaku sejak 30 Juni 2021

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur rekomendasi dan pendaftaran di OJK bagi lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang menguji kompetensi pegawai sektor jasa keuangan.

KENAPA ATURAN INI ADA

LJK butuh SDM yang kompeten. Sertifikasi kompetensi mengacu pada SKKNI dan KKNI, dan POJK 11/POJK.02/2021 menata LSP di sektor jasa keuangan lewat rekomendasi OJK (untuk lisensi BNSP) dan pendaftaran di OJK.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: lembaga sertifikasi profesi SJK

Berlaku sejak 30 Juni 2021

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 LSP yang mengajukan lisensi BNSP, atau mengubah skema sertifikasi, wajib mendapat surat rekomendasi OJK.

Sumber: ojk.go.id

2 LSP harus terdaftar di OJK sebelum menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja di sektor jasa keuangan.

Sumber: ojk.go.id

3 LSP wajib menyesuaikan skema sertifikasi dengan SKKNI dan KKNI terkini, serta menerbitkan sertifikat sesuai hasil uji kompetensi.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 LSP wajib mencabut sertifikat bila pemiliknya terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan (putusan berkekuatan hukum tetap) atau pelanggaran.

Sumber: ojk.go.id

5 Sertifikat yang terbit sebelum hingga 6 bulan setelah POJK berlaku tetap berlaku dan diakui.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memastikan sertifikasi kompetensi pegawai diperoleh dari LSP yang terdaftar di OJK.
- Mencatat masa berlaku sertifikat pegawai dan memperhatikan sertifikat yang dicabut LSP.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

SDM

Cek apakah LSP yang dipilih untuk sertifikasi pegawai sudah terdaftar di OJK dan berlisensi BNSP.

SDM

Simpan data sertifikat kompetensi pegawai beserta masa berlakunya untuk perencanaan sertifikasi ulang.

KAMUS KECIL

Istilah penting

LSP

Lembaga Sertifikasi Profesi, penyelenggara uji dan penerbit sertifikat kompetensi kerja.

BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi, pemberi lisensi LSP.

SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa syarat LSP agar boleh menyelenggarakan sertifikasi di sektor jasa keuangan?

JAWABAN

Harus terdaftar terlebih dahulu di OJK (dan untuk lisensi BNSP perlu rekomendasi OJK).

TANYA 2

Kapan LSP wajib mencabut sertifikat kompetensi seseorang?

JAWABAN

Bila pemiliknya terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; tanggal berlaku di halaman OJK 30-06-2021.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- POJK ini mengatur LSP, bukan BPR; kewajiban_bpr adalah kesimpulan praktis. Kewajiban sertifikasi kompetensi pegawai/pengurus BPR diatur di POJK lain.
- Naskah lengkap POJK 11/POJK.02/2021 belum dibaca; nomor pasal dan sanksi tidak dicantumkan.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penatalaksanaan-Lembaga-Sertifikasi-Profesi--di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penatalaksanaan-Lembaga-Sertifikasi-Profesi--di-Sektor-Jasa-Keuangan/Summary POJK - 11 - 02 - 2021.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.